

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Telah diketahui bersama bahwasanya membiarkan persoalan tanpa adanya jawaban serta membiarkan ummat dalam ketidaktahuan, Tidak perlu mengeluh tentang pesta demokrasi, karena yang terpenting adalah bagaimana memilih pemimpin tanpa konflik tajam, bahkan bagaimana tidak berdarah, bagaimana menghindari golput atau tidak menggunakan hak pilihnya, dan bagaimana bersama-sama mengawasi jalannya pemerintahan ini untuk membantu pemerintahan. engan kamera.

Negara dan agama kadang-kadang merupakan topik yang sangat tidak disetujui oleh para ahli. Hal ini diakibatkan adanya perbedaan pendapat mengenai apakah menerjemahkan agama sebagai komponen politik (negara) atau politik sebagai komponen dogma agama. Pada dasarnya, negara biasanya dipahami sebagai unit hidup bersama, yang merupakan kualitas yang melekat pada makhluk sosial. Oleh karena itu, politik publik pada hakikatnya adalah kemanusiaan.

Salah satu entitas yang mempunyai otoritas adalah negara. Sebagai negara yang otonom, berdaulat, dan mempunyai satu pemerintahan pusat yang membawahi segala bidang, maka Indonesia merupakan negara kesatuan.

Negara Indonesia adalah salah satu bentuk pemerintahan yang berdasarkan atau hukum (Rech stat) tidak berdasarkan atas legitimasi belaka (Macht Stat).

Keadaan dimana tindakan pemerintah dan masyarakat didasarkan pada hukum (positif) untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari penguasa masyarakat itu sendiri, pada umumnya disebut memiliki negara hukum.

Jadi Indonesia merupakan sebuah pemerintahan yang bersistem demokrasi., yaitu sistem pemerintahan yang sepenuhnya hak memilih tertinggi ditangan rakyat secara langsung, yakni yang berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

Di dalam ilmu politik dikenal dua macam arti tentang demokrasi, sebagaimana dijelaskan oleh Affan Gaffar, yakni:

1. Dalam pengertian normatif, demokrasi adalah sesuatu yang ingin dilaksanakan atau dibangun oleh suatu bangsa.
2. Pemahaman empiris juga ada dalam demokrasi. ilmuwan politik berdasarkan apa yang mereka lihat tentang demokrasi di seluruh negara. Secara empiris mendefinisikan demokrasi menggunakan beberapa indikator tertentu.

Selain itu, Indonesia juga memiliki sejumlah sektor pemerintahan yang dikenal dengan istilah pesta demokrasi, atau disingkat pemilu. Dalam setiap pemilu, isu kelas kulit putih, yang juga dikenal sebagai abstain, sering kali menjadi topik hangat dan rencana penting. Ada kecenderungan, meskipun kecil, proporsi pemilih kulit putih meningkat pada setiap pemilu. Sekelompok orang yang dikenal sebagai Kelompok Putih, atau mereka yang tidak ingin menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, selalu dapat ditemukan di partai Pemilu

Demokrat mana pun, apa pun negaranya. Dari segi politik, Golput telah menjadi bagian dari dinamika sejak Pemilu Nasional tahun 1955. Saat itu, kondisi politik antara kaum Unitarian dan Federalis telah menimbulkan saling intimidasi yang menempatkan masyarakat pada situasi genting. Oleh karena itu, mendukung Golput dinilai lebih baik dibandingkan menjadi sasaran intimidasi lawan politik partai terpilih.

Pemilu adalah Pesta rakyat yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali dan merupakan peristiwa penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia ini menjadi tolak ukur bagi seluruh masyarakat dan akan menentukan nasib negara dalam dua tahun ke depan. Pemilihan presiden akan berlangsung beberapa bulan setelah pemilihan parlemen yang untuk pertama kalinya akan berlangsung di gedung perwakilan rakyat. Masyarakat sadar sepenuhnya bahwa nasib mereka akan ditentukan pada dua periode tersebut.

Namun pada dasarnya, banyak masyarakat yang tidak peduli dengan pemilu, sehingga tidak menggunakan hak pilihnya. Naiknya Golput ke tampuk kekuasaan dan kemenangan pemilu merupakan beban psikologis dan politik bagi kita semua di negara ini, baik bagi pihak berwenang maupun politisi. Intinya, besarnya jumlah dan bahkan kemenangan Golput menunjukkan lemahnya legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu dan pemenangnya, padahal jumlahnya melebihi pemenang dan tidak membatalkan hasil pemilu.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa tingkat partisipasi, khususnya kemampuan mempengaruhi arah pengambilan keputusan, adalah hal yang

memberi legitimasi pada perspektif demokrasi. Faktor utama yang mempengaruhi kontribusi fungsional adalah legitimasi, yang juga berkontribusi terhadap hasil demokrasi. Jika hal ini tidak terjadi, keberadaan demokrasi sama saja dengan ketiadaan demokrasi. Bahkan peraturan perundang-undangan yang menjadi produk hukum penyelenggaraan pemilu telah memutarbalikkan semangat pencegahan golpert. Saat ini, sistem demokrasi pemilu yang menjadi landasan penyelenggaraan negara tidak mampu menghentikan upaya preventif terhadap golpert.

Islam membutuhkan kepemimpinan melebihi segalanya. Dengan kata lain, sebagai suatu kumpulan manusia, manusia membutuhkan seorang pemimpin. Dalam konteks Islam, pemimpin harus dapat diandalkan, jujur, aktif, dan bercita-cita menjadi pemimpin (tabligh), serta cakap (fatnah). dan membela hak-hak rakyat Islam, sebagaimana yang telah difirmankan Allah Swt. dalam Al-Qur'an QS. An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ

فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

تَأْوِيلًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat.)*

Ayat ini mengamanatkan agar setiap umat Islam memilih pemimpin atau wakil pemimpin yang memenuhi standar ideal untuk mencapai cita-cita bersama sesuai dengan pilihan rakyat dan kepentingan negara.

Al-Ahkam al-Sultaniyah: Pandangan Al-Mawardi dalam memilih pemimpin Jika imamah terbukti wajib, maka (menambah) kewajiban itu fardu kifayah, seperti jihad dan menuntut ilmu. Jika ada orang yang mampu menegakkan imamah, maka kewajiban lainnya adalah, jika tidak ada orang yang mampu menjalankannya, maka dipilih dua kelompok orang di antara masyarakat: kelompok legislatif, yang memilih a. pemimpin untuk ummat, dan kelompok pemimpin (calon), yang berlanjut hingga salah satu dari mereka terpilih untuk membela pemimpin.

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemilihan umum yang disebut juga pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan masyarakat dalam rangka pemilihan wakil Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Perwakilan Daerah. Dewan. Pemilihan umum ini diselenggarakan secara transparan, terbuka, jujur, dan adil sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan melalui serangkaian proses yang meliputi:

1. Sosialisasi;
2. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggara pemilu;
3. Pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;

4. Pendaftaran serta verifikasi peserta pemilu;
5. Penetapan peserta pemilu;
6. Penetapan jumlah kursi serta penetapan daerah pemilih pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota;
7. Masa kampanye pemilu;
8. Masa tenang;
9. Pemungutan dan penghitungan suara; penetapan hasil pemilu; dan
10. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden dan anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Perhitungan suara pilkada 2020 telah usai, tak terkecuali kabupaten/kota di Sumatera Utara, terlepas dari hal tersebut jumlah golongan putih atau biasa disebut dengan golput tetap saja ada, Kota Medan menjadi pilkada dengan golongan putih terbanyak jika di bandingkan kota kota lain di Sumatera Utara seperti Serdang Bedagai, Deli Serdang, Labuhanbatu Selatan pun sudah rampung, termasuk penghitungan suara Pilkada Kota Medan tahun 2020. Berdasarkan data KPU KPU, kelompok putih yang selanjutnya disebut golputlah yang menjadi pemenang, bukan pasangan yang terdaftar. Awalnya terdaftar 4.299 TPS dari 1.636.846 daftar pemilih tetap (DPT) di 4.303 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Medan. Untuk salah satu calon wali kota dan wakil wali kota Medan, total suara yang diperoleh sebanyak 887.024 suara atau 55,7 persen tidak masuk dalam data pemilih. Dari 43.265 pemilih yang terdaftar di Kecamatan Medan Maimun yang memiliki tingkat partisipasi pemilih terendah pada Pilkada Kota Medan

2020, Di Kecamatan Medan Maimun, hanya 16.585 orang atau sekitar 38% dari total pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang benar-benar menggunakan hak pilihnya.

Menurut data, suara efektif Pilkada di Medan adalah 735.907 atau setara dengan 45,3 persen dari total DPT saat ini. Calon menjadi pemenang Pilkada Medan 2020 dengan Nomor 02 Bobby Nasution-Aulia Rachman memperoleh 53,4 persen dari total suara sah atau 393.327 suara. Pada saat yang sama, lawannya, Akhyar Nasution-Salman Alfarisi, memperoleh 46,6% suara atau 342.580 suara. Melihat data tersebut, jika dibandingkan perolehan suara golput dengan kemenangan Bobby-Aulia memang jauh tertinggal.

Dari pemaparan singkat diatas menggambarkan bahwa setiap pilkada golput cenderung selalu ada. Berangkat dari pemaparan singkat diatas penulis mencoba menganalisa tentang golongan putih di Kota Medan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“GOLPUT DALAM PILKADA KOTA MEDAN (Analisis Terhadap Pemilih Kecamatan Medan Maimun Pada Pilkada Tahun 2020”**.

## B. Rumusan Masalah

**Dari pemaparan singkat diatas menggambarkan bahwa setiap pilkada golput cenderung selalu ada. Maka dapat ditarik permasalahan yaitu:**

1. Apa faktor penyebab golput kecamatan Medan Maimun dalam pilkada tahun 2020 di Kota Medan?

## 2. Bagaimana solusi dalam menurunkan golput di Kecamatan Medan

Maimun pada Pilkada kota Medan tahun 2020?

### C. Batasan Istilah

Penulis percaya bahwa penting untuk menentukan kata-kata yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya: untuk mencegah kesalahpahaman dan makna ganda dalam penelitian ini.

#### 1. Golput (Golongan Putih)

Sebuah ungkapan yang digunakan dalam politik di Indonesia yang berasal dari gerakan protes pemuda dan mahasiswa terhadap pemilu tahun 1971, yang menandai dimulainya era Orde Baru. Sepuluh partai politik mencalonkan diri, yang merupakan penurunan signifikan dari 172 partai politik yang mencalonkan diri pada pemilu 1955.

Gerakan ini dipimpin oleh tokoh terkenal Arief Budiman. Namun Imam Waluyo-lah yang pertama kali mencetuskan istilah “Golput”. Kata “putih” digunakan karena gerakan ini mendorong pemilih untuk memilih bagian putih dari surat suara atau kertas yang letaknya di luar gambar partai politik yang mencalonkan diri. Namun karena teridentifikasi, tak jarang ada yang takut tidak hadir di tempat pemungutan suara (TPS) saat itu. Partai politik terkemuka era Orde Baru, Golongan Karya, kemudian disebut sebagai “kelompok kulit putih” sebagai oposisi.

## 2. Pilkada 2020

Berdasarkan Undang Undaang Republik Indonesia No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu adalah cara untuk memilih cabang pemerintahan legislatif dan eksekutif dengan menggunakan kedaulatan rakyat. Mereka yang memenuhi syarat dan merupakan penduduk wilayah administrasi setempat langsung mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Pelaksanaan Pilkada juga untuk memilih wakil kepada daerah. Beberapa pihak yang termasuk sebagai Kepala Daerah dan Wakilnya ialah Gubernur dan Wakilnya yang berada ditingkat Provinsi, Bupati dan Wakilnya yang berada ditingkat Kabupaten serta Walikota dan Wakilnya yang berada ditingkat Kota.

### D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah untuk:

1. Mengetahui faktor penyebab golput kecamatan dalam pilkada tahun 2020 di Kota Medan.
2. Mengetahui solusi dalam menurunkan golput di kota Medan tahun 2020.

### E. Kegunaan Penelitian

Secara teoristis hasil penelitian ini diharapkan mampu:

1. Memberikan sumbangan pemikiran dan menambah khazanah pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan politik.

2. Menjadi bahan pemikiran dalam mengaktualisasikan aspek kajian politik di Indonesia. Penelitian ini juga nantinya menjadi referensi dalam memahami faktor penyebab pemilih yang tidak menggunakan hak pilih pada pilkada Kota Medan 2020.

Penelitian ini juga sangat bermanfaat sebagai bahan kajian dalam pengembangan ilmu perpolitikan khususnya tentang golongan putih dalam pilkada Kota Medan 2020.

#### F. Kajian Terdahulu

1. Sebelumnya Penelitian ini juga pernah diteliti oleh M. Saefuddin dengan judul **GOLONGAN PUTIH (GOLPUT) DI KOTA PALEMBANG PADA PILPRES TAHUN 2019**. Berdasarkan temuan penelitian penulis, fenomena tidak ikut serta dalam pemilu pertama bukanlah hal baru; malahan, hal ini telah lama berkembang menjadi narasi yang mendukung pelaksanaan pemilu di Indonesia, termasuk Pilpres dan Pilkada. dilakukan. Kota Palembang menjadi salah satu kota yang persentase golputnya cukup signifikan pada Pilpres 2019. Faktanya, angka golput di Kota Palembang sebesar 19,3%, angka yang dinilai cukup tinggi.
2. Selain itu juga pernah diteliti oleh Yogi Alhafiz dengan judul **PERILAKU GOLPUT DALAM PEMILIHAN RAYA IAIN RADEN SULTAN LAMPUNG TAHUN 2016**. Berdasarkan temuan penelitian, hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa Pemira yang dilaksanakan di Fakultas Ushuluddin tidak berjalan lancar. Secara spesifik, hasil Pemira tahun ini yang dilaksanakan di Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung tahun 2016 menunjukkan tingkat partisipasi mahasiswa yang sangat memprihatinkan. Berdasarkan data yang dikumpulkan akademisi melalui wawancara dengan responden, hanya 460 mahasiswa dari total mahasiswa pemilih yang aktif

menggunakan hak pilihnya. Karena lebih dari separuh pemilih abstain dalam menggunakan hak pilihnya, pemilu dapat dianggap gagal.

## **A. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analitik pada tahap pengembangan dan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Paradigma penelitian yang dikenal sebagai penelitian kualitatif sangat menekankan pada pemahaman permasalahan sosial berdasarkan keadaan sebenarnya. Penelitian deskriptif analitis menyajikan subjek sebagaimana adanya.

### **2. Objek Penelitian**

Pada hakikatnya pendekatan mendasar penelitian kualitatif deskriptif dapat diterapkan dalam lingkup yang paling sempit, yaitu dari konteks sosial tunggal melalui suatu institusi hingga masyarakat yang besar dan kompleks.

### **3. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah informasi yang diperoleh dari percakapan dengan Komisi Pemilihan Umum, organisasi yang menyelenggarakan pemungutan suara.

#### **b. Data Sekunder**

Data pendukung penelitian ini diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum alias KPU Kota Medan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Wawancara**

Peneliti melakukan wawancara dalam hal ini. Protokol wawancara terstruktur yang sistematis dan komprehensif digunakan oleh para peneliti. Hanya baris yang menentukan pertanyaan yang akan diajukan yang digunakan dalam wawancara untuk mengumpulkan data.

##### **b. Dokumentasi Research**

Teknik pengumpulan data ini dengan cara mengumpulkam dokumendokumen yang berkenaan dengan penelitian ini, baik berupa sumber tertulis, baik dari media cetak, elektronik, internet dan sebagainya yang memberikan informasi dalam proses penelitian.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Penelitian kualitatif menggunakan prosedur analisis data yang melibatkan pengumpulan data dari kerja lapangan melalui wawancara mendalam dan mengkategorikan dokumen yang dikumpulkan. Setelah klasifikasi, penulis menawarkan penafsiran dan argumen untuk beralih dari persoalan khusus ke persoalan umum.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdiri dari beberapa komponen yang disusun menjadi lima bab. Adapun kerangka penelitiannya sebagai berikut:

1. **BAB I PENDAHULUAN.** Latar belakang masalah, konsepsi, tujuan penelitian, manfaat, keterbatasan waktu, teknik penelitian, dan sistematika penulisan semuanya dimuat dalam bab ini.
2. **BAB II KAJIAN TEORITIS.** Pada bab ini akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Pemilu dan Golput.
3. **BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN.** Bab ini akan memberikan gambaran singkat mengenai wilayah Kota Medan, dengan fokus pada Kecamatan Medan Maimun. Upaya dakwah Salafi di Kecamatan Percut Sei Tuan.
4. **BAB IV ANALISIS.** Bab ini membahas mengenai analisis penulis terhadap Pilkada di Kota Medan. Serta hal-hal yang menyebabkan terjadinya golput di Kota Medan, dampak, serta pandangan Islamm terhadap golput.
5. **BAB V PENUTUP.** Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran dari isi penelitian yang telah penulis selesaikan.